



SAFEnet

Laporan Triwulan PEMANTAUAN HAK-HAK DIGITAL DI INDONESIA

20
23

TRIWULAN I

Peretasan Whatsapp

Pukul 1.00 WIB, salah satu kawan kami dihubungi melalui pesan teks dari nomor tidak dikenal. Setelah pemilik nomor tersebut mengaku dari Polda Sumatera Utara. Tak lama setelah pesan teks masuk, pemilik nomor menelepon yang kemudian diangkat oleh kawan kami.

AKTIVIS MEDAN DIBUNGKAM (LAGI)

Dalam percakapan telepon, pemilik nomor menyalai kawan kami perihal pelaksanaan Aksi Kamisan #34 yang rencananya akan berlangsung seperti biasa hari ini. Pemilik nomor juga mengajak kawan kami untuk ngosi atau bertemu secara langsung. Kawan kami menolak karena tidak ada juga kepentingan kami untuk bertemu aparat kepolisian. Pun begitu, pemilik nomor tetap mengupayakan untuk bertemu keesokan harinya (hari ini).

AKTIVIS MEDAN DIBUNGKAM (LAGI)

Peretasan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, peretasan pernah terjadi pada 6 Juli 2022 menjelang Aksi Kamisan #7 yang juga bertepatan dengan kedatangan Jokowi waktu itu.

AKTIVIS MEDAN DIBUNGKAM (LAGI)

Peretasan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, peretasan pernah terjadi pada 6 Juli 2022 menjelang Aksi Kamisan #7 yang juga bertepatan dengan kedatangan Jokowi waktu itu. Peretasan ini adalah perilaku menjijikkan dan menjadi perwujudan watak angkuh aparat dan adalah sebuah kebobrohan apabila peretasan dilakukan dalam rangka mengamankan agenda kunjungan Jokowi di Medan. Seharusnya, keberadaan Aksi Kamisan maupun aksi-aksi lain di Medan harus diketahui oleh Jokowi, selayaknya Pemimpin yang harus mendengar aspirasi. Keberulangan peretasan dan intimidasi terhadap Aksi Kamisan Medan adalah buah dari kecacatan pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh Institusi Kepolisian.

AKTIVIS MEDAN DIBUNGKAM (LAGI)

Salah satu kerabat kawan kami tiba menghubungi dan perantara dari pihak yang dari Kepolisian, ia men dengan cara me rekening kasus imbalan s yang dibatalkan pihak kepolisian.

Laporan Triwulan
Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia
Periode : Januari - Maret 2023






Penanggung jawab:
Damar Juniarto

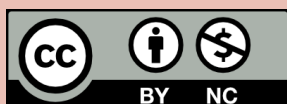
Koordinator & Editor:
Anton Muhajir

Tim Pemantauan:
Abul Hasan Banimal
Nabillah Saputri
Nenden Sekar Arum
Nike Andaru
Unggul Sagena

Desainer & Tata Letak:
Daeng Ipul

Penerbit
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Jalan Gita Sura III Nomor 55 Peguyangan Kaja
Denpasar, Bali 80115

 : +62 811 9223375
 : info@safenet.or.id
  : @safenetvoice
 : safenet.or.id



Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda bebas untuk mendistribusikan, mencampur ulang, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau format apa pun hanya untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta. Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Pengantar

Sejak tahun 2022, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) membuat laporan pemantauan pelanggaran hak-hak digital setiap tiga bulan (triwulan). Laporan ini merupakan pengembangan dari *Laporan Situasi Hak-hak Digital* yang sudah kami lakukan sejak 2019 lalu. Berdasarkan pemantauan yang semakin intensif kami lakukan sejak empat tahun terakhir, bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak digital tersebut semakin berkembang dan banyak.

Setelah melakukan evaluasi dan refleksi, kami menganggap laporan setahun sekali terkait situasi hak-hak digital di Indonesia ternyata tidak cukup memadai untuk menangkap situasi yang ada karena begitu banyaknya insiden maupun pelanggaran. Oleh karena itu, kami berharap laporan tiap triwulan ini akan bisa lebih menjelaskan situasi dan kondisi hak-hak digital di Indonesia secara lebih aktual dan faktual.

Secara sederhana, hak-hak digital adalah hak asasi manusia yang berlaku di ranah digital. SAFEnet membaginya dalam tiga domain, yaitu hak untuk mengakses Internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Pada bagian hak atas rasa aman tersebut, kami juga memasukkan aspek kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Pelanggaran hak-hak digital kami definisikan sebagai semua upaya secara sengaja untuk mengganggu terpenuhinya hak-hak digital tersebut. Contoh pelanggaran hak-hak digital ini bisa berupa pembatasan terhadap akses Internet, pemidanaan terhadap ekspresi dan opini, penyerangan terhadap aset-aset digital, dan pelanggaran terhadap privasi.

Pemantauan ini menggunakan tiga sumber. Pertama, laporan langsung ke platform aduan pelanggaran hak-hak digital yang dikelola SAFEnet. Kedua, laporan ke akun media sosial dan *hotline* SAFEnet. Ketiga, pemantauan media massa dan media sosial. Terkait akses Internet, pemantauan juga menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Internet Outage Detection and Analysis (IODA).

Hasil pemantauan tersebut kami sajikan tidak hanya berupa angka dan data, tetapi juga analisis terhadap beberapa insiden sebagaimana bisa dibaca dalam laporan ini.

Bagian 1 : Akses Internet



Perkembangan dan dampak infrastruktur serta kecepatan dan keterjangkauan akses Internet masih mendominasi isu akses Internet pada tiga bulan pertama 2023. Hingga [awal 2023](#) dari 276,4 juta jiwa penduduk, 212,9 juta penduduk (77 persen) sudah mengakses Internet. Walaupun tingkat penetrasi ini cukup tinggi, perlu dicatat, 23 persen penduduk berarti belum dapat mengakses Internet. Jika dihitung berarti masih terdapat 63,5 juta penduduk belum menikmati akses Internet, mengalami titik kosong dan atau koneksi yang tidak stabil dan tidak bisa diandalkan. Mereka terutama berada di 84.000 desa termasuk [fasilitas publik](#) seperti 250.000 sekolah dan 10.000 puskesmas. Indonesia pada tahun lalu saja merupakan negara [peringkat 8 dunia](#) yang masyarakatnya paling banyak tidak mendapat akses Internet, jika dihitung dari jumlah penduduk.

Selama Januari – Maret 2023, terdapat berita mengenai terhambatnya akses Internet di Indonesia. Berita di media masih didominasi gangguan akses Internet di Papua, misalnya kabel laut putus yang sudah menjadi langganan tiap tahun pulau di ujung timur Indonesia ini.

Gangguan lain, misalnya, pemutusan akses Internet gratis dari pemerintah DKI Jakarta yang mengevaluasi pemberian akses Internet gratis warga masyarakat. Kebijakan ini perlu dicek ulang karena akses Internet merupakan hak setiap warga negara. Jangan sampai pemutusan ini berdampak kepada masyarakat sehingga tidak dapat mengakses internet dengan gratis karena keterbatasan keterjangkauan akses.

Berikut ini tabel jumlah gangguan Internet di Indonesia dengan skala cukup luas dan lintas pelanggan yang ditangkap media daring.

No	Lokasi	Waktu	Gangguan	Dampak
1.	Jakarta	1 Januari 2023	JakWifi sebagai akses Internet gratis mendukung PJJ diputus dan akan dievaluasi	Masyarakat menengah ke bawah tidak dapat mengakses Internet gratis
2.	Palu	10 – 17 Jan 2023	Kabel optik dirusak orang tak dikenal, jaringan putus di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD)	Pelayanan publik di Kota Palu terganggu
3.	Palangka Raya	31 Maret 2023	Hujan deras dan angin kencang menyebabkan kabel fiber optik putus	Masyarakat di beberapa titik di Palangka Raya terganggu akses internet

4.	Papua	20 – 27 Feb 2023	PT. Telkom akan mulai melakukan perbaikan jaringan kabel laut di perairan Merauke, Papua. Perbaikan dilakukan karena luka pada jaringan kabel laut, yang berjarak 107 km dari Merauke dan berada di kedalaman 33 m. Perbaikan dilakukan karena berpotensi putusnya kabel SKKL SMPCS ruas Merauke – Sorong. Perbaikan kabel SKKL SMPCS dilaksanakan satu minggu mulai tanggal 24 Februari – 2 Maret 2023, mundur dari rencana awal tanggal 20 Februari 2023 sehubungan dengan adanya kendala cuaca.	Penurunan kualitas internet di Merauke, Timika, Kaimana
5.	Bali	22 – 23 M a r e t 2023	Data seluler dimatikan selama 24 jam saat perayaan Nyepi 2023 Tahun Baru Saka 1945 di Bali. Hal itu tercantum dalam Seruan Bersama Majelis-Majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan Provinsi Bali Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1945. Mulai dari Rabu, 22 Maret 2023 pukul 06.00 Wita hingga Kamis, 23 Maret 2023 pukul 06.00 WITA.	Masyarakat di Pulau Bali

Tabel 1. Gangguan Internet di Indonesia pada Januari - Maret 2023. (Sumber: Berbagai media.)

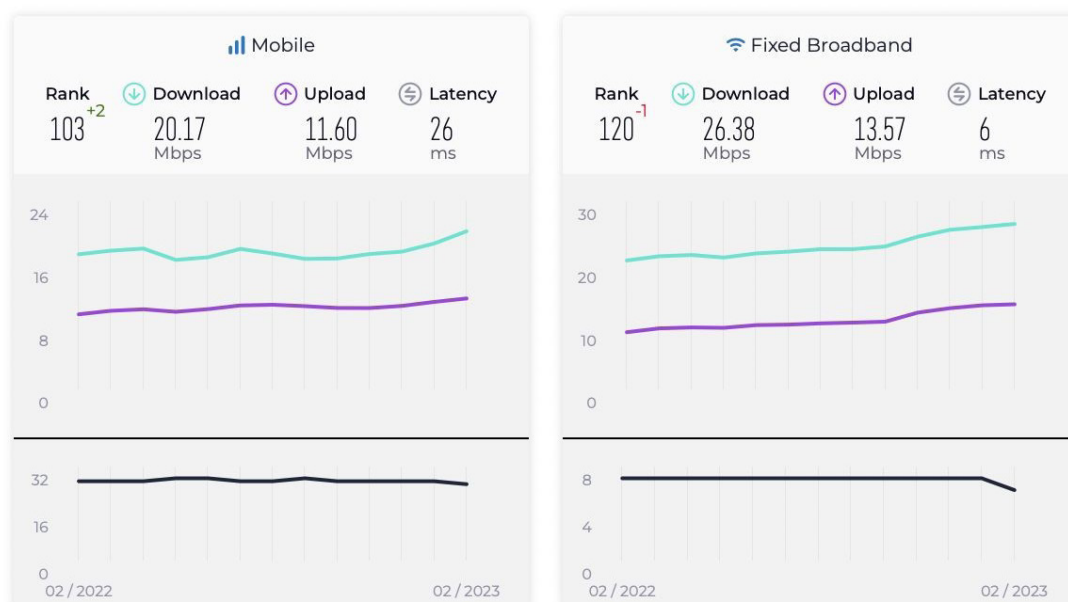
Pemantauan di IODA menunjukkan aktivitas ketidakstabilan koneksi pada hari-hari tertentu, walaupun jumlahnya tidak banyak. Akan tetapi, tidak terpantau gangguan signifikan pada akhir Februari hingga awal Maret sesuai informasi pihak Telkom. Terdapat ketidakstabilan secara acak pada akhir Maret yang mengombinasi dua pantauan *dashboard*. Aktivitas pada akhir Maret terkait dengan meningkatnya intensitas konflik aparat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu terdapat gangguan identik pada 22-24 Januari 2023 pada kedua *dashboard* karena gempa bumi di [sekitar Jayapura](#).

Hasil pantauan IODA dirangkum pada tabel di bawah ini:

Region pada Dashboard IODA	Januari	Februari	Maret	Total
Irian Jaya Barat	(1) 14 Jan (2) 17-20 Jan (3) 22-24 Jan	(1) 17 Feb (2) 24 Feb	(1) 25-26 Mar	6
Papua	(1) 13 Jan (2) 19 Jan (3) 22-24 Jan	(1) 7 Feb (2) 10-12 Feb	(1) 24 Mar (2) 23-28 Mar	7

Tabel 2. Gangguan Internet di Papua dan Papua Barat Januari - Maret 2023. Sumber: IODA.

Selain kendala terputusnya akses dengan beragam alasan, Internet di Indonesia juga terus menghadapi masalah kecepatan. Kondisinya sangat buruk dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Speedtest Global Index pada Februari 2023 menunjukkan kinerja Internet bergerak dan kabel pita lebar di Indonesia sangat rendah, bahkan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara. Walaupun naik dua peringkat menjadi peringkat 103 dunia pada Februari 2023, Indonesia masih menempati posisi buncit juru kunci koneksi Internet bergerak di seluruh Asia Tenggara. Untuk urusan kabel pita lebar malah turun satu peringkat menjadi urutan 120 dunia.



Gambar 1: Kecepatan Rata-rata Internet di Indonesia. Sumber: Speedtest by Ookla, Feb 2023.

Kontras terhadap hasil tersebut, Telkomsel sebagai salah satu “operator pelat merah” Indonesia memperoleh [tiga penghargaan](#) sekaligus dari Ookla. Berdasarkan laporan Ookla® Speedtest Awards™ 2022, untuk kategori Fastest Mobile Network, Telkomsel memiliki kecepatan akses pita lebar tertinggi di Indonesia dengan Speed Score mencapai 27,27 Mbps. Sedangkan pada Kategori Best Mobile Coverage, Telkomsel meraih Coverage Score sebesar 882, dengan 97,3 persen pelanggan telah terlayani oleh jaringan broadband 4G/LTE Telkomsel.

Capaian terbaik pada dua kategori tersebut menempatkan Telkomsel sebagai peraih predikat Best Mobile Network. Sebagai informasi, pada Internet kabel pita lebar, Indonesia menempati peringkat terbawah secara global, yakni 120, dengan kecepatan 26,38 Mbps. Kondisi tersebut jika disandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia hanya mampu unggul dari Kamboja (20,8 Mbps) dan Myanmar (19,68 Mbps).

Negara ASEAN	Peringkat dunia kecepatan Internet	
	Seluler	Kabel/Rumahan
Singapura	22	1
Brunei	16	85
Malaysia	46	36
Vietnam	52	39
Laos	68	111
Myanmar	75	133
Thailand	54	6
Filipina	80	40
Kamboja	96	127
Indonesia	103	120

Tabel 3. Peringkat kecepatan Internet negara-negara ASEAN, Februari 2023. Sumber: Speedtest by Ookla.

Informasi lain terkait akses Internet di Indonesia selama triwulan pertama 2023 adalah pembangunan infrastruktur. Klaim selesainya pembangunan infrastruktur seperti Palapa Ring fase pertama (barat) pada tahun 2018, fase kedua (tengah) pada 2019, dan fase terakhir (timur) sudah 88,14 persen seharusnya berdampak signifikan terhadap peningkatan dan pemerataan akses Internet di Indonesia.

Selain itu, [Proyek Satelit](#) SATRIA dan Satelit HBS (Hot Backup Satellite) juga direncanakan bisa menyelesaikan masalah akses di daerah 3T dengan satelit dengan kapasitas cukup besar, yaitu Satria – 150 Gbps dan HBS – 80 Gbps. Keberadaan satelit ini diperkirakan mampu [mendukung kebutuhan](#) Internet di 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintahan daerah, 3.700 puskesmas, dan 3.900 markas polisi dan TNI yang sulit dijangkau kabel optik.

Namun, di sisi lain, publik juga disuguhi berita tentang [korupsi pengadaan stasiun pemancar \(BTS\)](#); infrastruktur yang sangat penting dalam melayani koneksi internet masyarakat. Kasus ini memperparah kondisi hak atas akses Internet, terutama karena BTS 4G yang dibangun ini wajib merata, menyusul kebijakan “suntik mati sinyal 3G” di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2022 lalu secara bertahap.

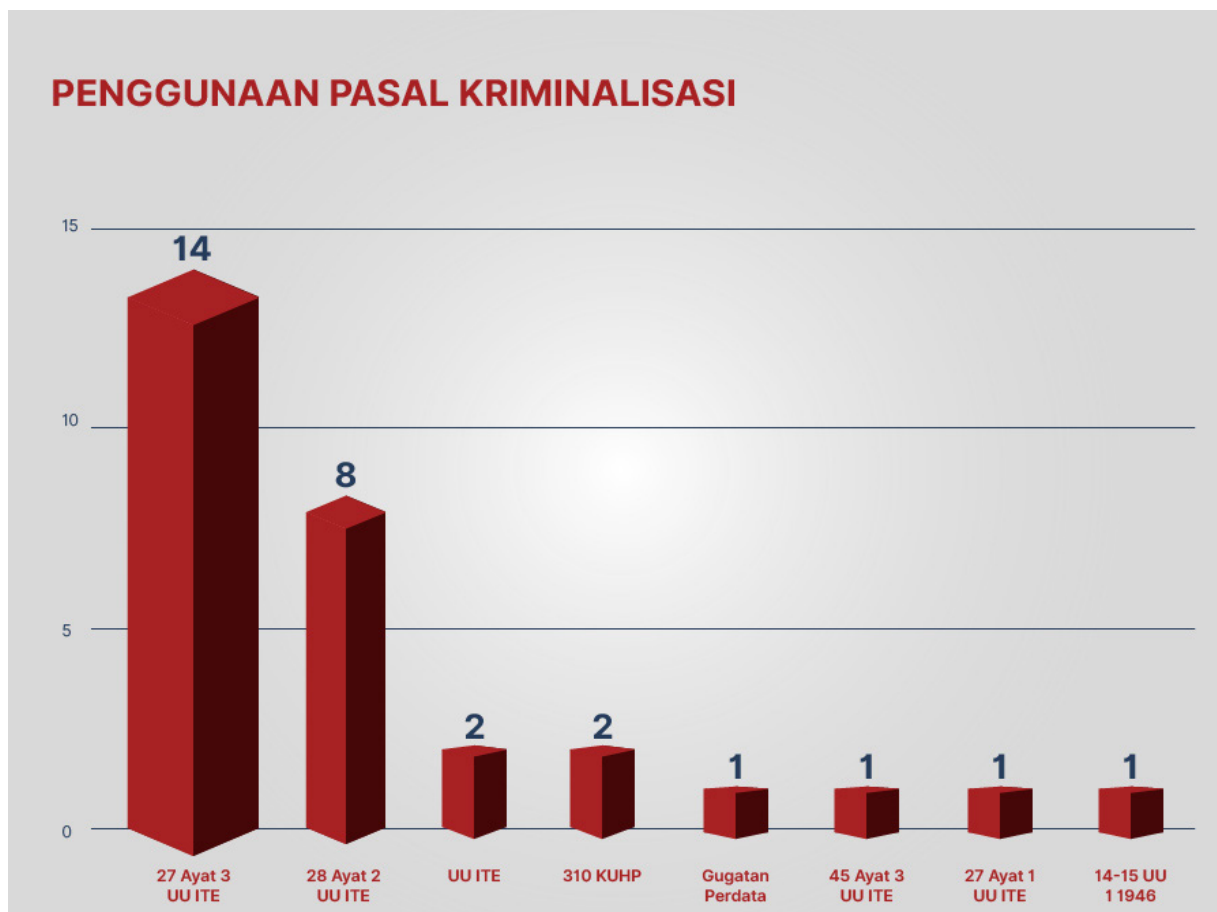
Dengan adanya 128 persen sambungan seluler di Indonesia pada [awal tahun 2023](#), maka 353,8 juta pengguna Internet wajib menggunakan gawai yang mendukung 4G. Kebijakan terkait transformasi digital ini juga harus membuat pemilik ponsel “jadul” membeli ponsel baru, mengganti kartu SIM dan juga membeli biaya layanan baru yang pada sebagian masyarakat, cukup memberatkan. Rendahnya keterjangkauan ditambah dengan koneksi yang lamban, membuat hak akses Internet tidak terpenuhi dengan baik.

Bagian 2: Kebebasan Berekspresi



Berdasarkan data dari formulir aduan SAFEnet dan pemantauan media, tercatat ada 30 kasus kriminalisasi ekspresi pada periode Januari-Maret 2023 dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 49 orang.

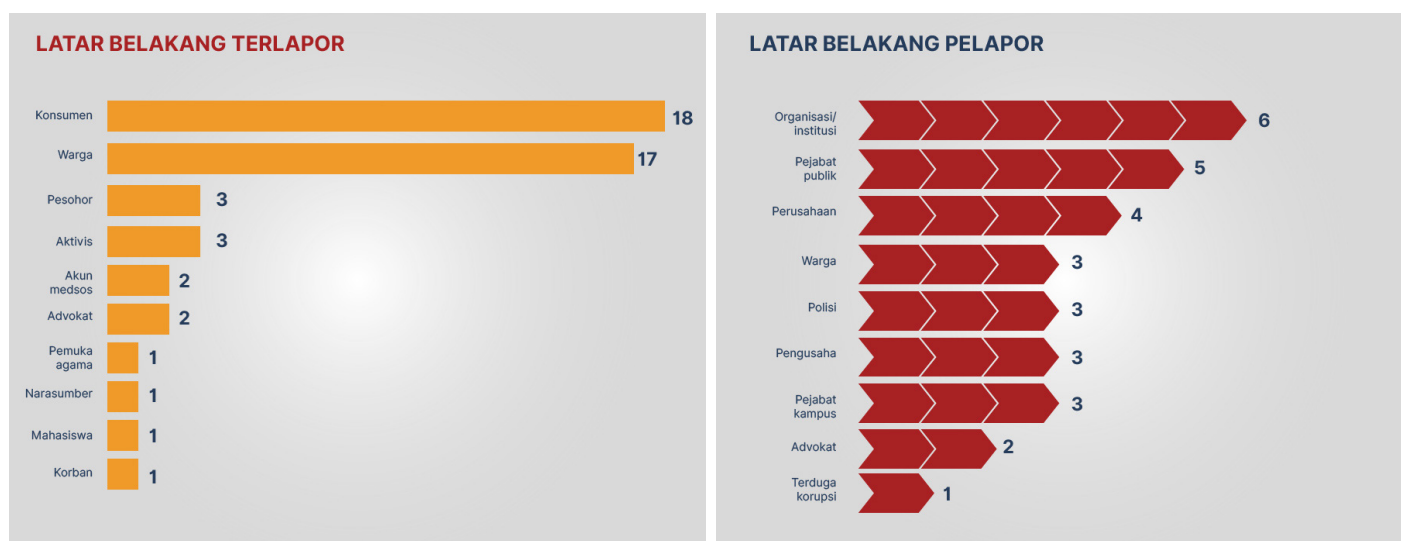
Dugaan pelanggaran paling banyak digunakan adalah pasal terkait pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebanyak 14 kasus dan pasal 310 KUHP sebanyak 2 kasus. Kemudian dugaan ujaran kebencian dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE tercatat sebanyak 8 kasus. Selain itu, dugaan penyebaran berita bohong dengan pasal 14 dan 15 UU No.1/1946 sebanyak 1 kasus. Di samping itu, ada juga kasus yang menggunakan pasal 45 ayat 3 UU ITE terkait ancaman kekerasan, Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait tindakan asusila, dan gugatan perdata yang menyebabkan kerugian perusahaan masing-masing 1 kasus.



Gambar 2: Penggunaan pasal kriminalisasi terhadap ekspresi di ranah digital selama Januari - Maret 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Dari latar belakang korban yang dilaporkan ke polisi, mayoritas adalah konsumen sebanyak 18 orang, kemudian warganet sebanyak 17 orang, aktivis dan pesohor masing-masing 3 orang, advokat dan akun medsos masing-masing 2 orang, serta pemuka agama, narasumber berita, mahasiswa dan korban kekerasan masing-masing 1 orang.

Adapun pelapor paling banyak mewakili organisasi atau institusi sebanyak 6 kasus, pejabat publik sebanyak 5 orang, atas nama perusahaan sebanyak 4 kasus, lalu warga, pengusaha, pejabat kampus dan polisi masing-masing 3 kasus, advokat 2 orang, dan terduga pelaku korupsi sebanyak 1 orang.



Gambar 3: Latar belakang terlapor dan pelapor kriminalisasi terhadap ekspresi di ranah digital periode Januari - Maret 2023. Sumber: SAFEnet, 2023.

Dari kasus-kasus yang dihimpun SAFEnet pada kuartal pertama 2023, pasal pencemaran nama paling banyak digunakan oleh pejabat publik dan pengusaha. Misalnya kasus yang melibatkan seorang pengusaha tersohor di TikTok, John LBF dengan Septia, mantan karyawan yang mengungkapkan situasi kerja di perusahaan milik pelapor pada [utas Twitter yang viral](#). Selain itu, Pemilik perusahaan Hive Five itu juga melaporkan seorang pengacara karena melaporkan dirinya atas dugaan [penipuan hingga Rp1,8 miliar](#).

Kepala Desa Ungga di Nusa Tenggara Barat juga melaporkan warganya dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE setelah mereka melakukan aksi di kantor desa karena ada dugaan pelecehan yang dilakukan [Kepala Desa](#). Kejadian lain adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh juga [melaporkan seorang perempuan](#) yang menggugat dirinya terkait kasus asusila.

Selain itu, gugatan sebesar Rp 56 miliar dilayangkan oleh pengelola perusahaan properti Meikarta kepada 18 orang konsumen karena [dinilai mencemarkan nama baik perusahaan](#). Para konsumen tersebut dianggap telah memberikan pernyataan dan tuduhan menyesatkan kepada perusahaan karena aksi mereka dalam menuntut hak akibat mangkraknya proyek apartemen tersebut.

Sementara itu, pasal ujaran kebencian paling banyak digunakan pelapor yang mengaku mewakili sebuah institusi atau organisasi. Misalnya terjadi pada akun TikTok @dandy_tarigan_ yang [dilaporkan oleh perwakilan DPC PDIP Medan](#) dengan dugaan telah melakukan penghinaan terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati yang dianggap sebagai simbol partai. Seorang pemuka agama juga dilaporkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan karena [dianggap memfitnah](#) pendiri NU, KH Hasyim Asyari. Ada pula [warganet yang ditangkap](#) karena mengunggah konten yang dianggap merupakan ujaran kebencian terhadap Institusi Polri.

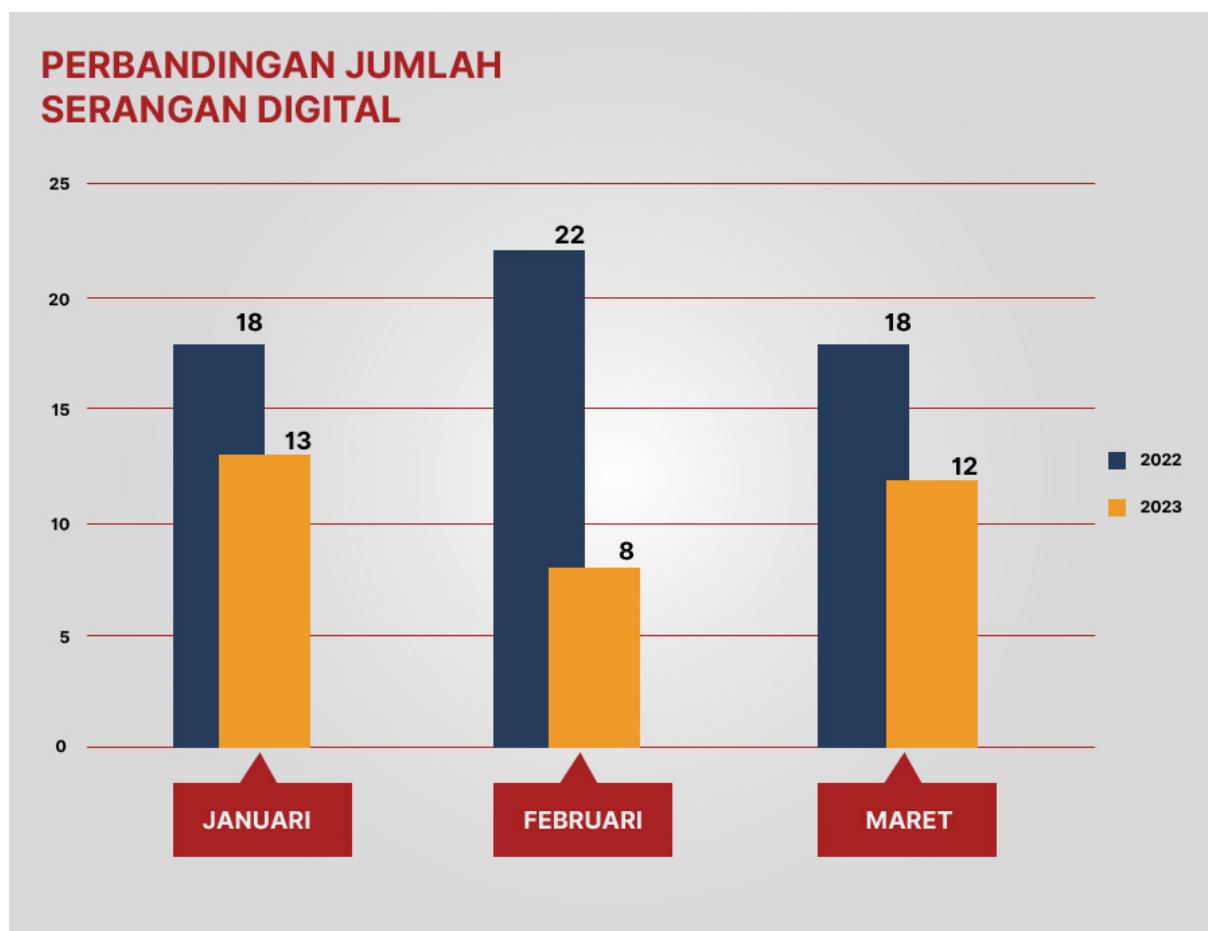
Pada periode ini, kasus pelaporan dugaan pencemaran nama yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan sejak 2021 [melawan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti](#) mulai menjalani masa sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bagian 3 : Keamanan Digital



Berdasarkan pemantauan selama periode Januari - Maret 2023, jumlah insiden keamanan digital tetap marak. Selama tiga bulan tersebut terjadi setidaknya 33 insiden keamanan digital sebanyak 33 kali, yaitu 13 pada Januari, 8 pada Februari dan 12 pada Maret 2023.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut lebih sedikit. Selisihnya 17 insiden. Pada tiga bulan pertama 2022 lalu terdapat 48 insiden dengan rincian 18 insiden pada Januari 2022, 22 (Februari), dan 18 (Maret). Artinya, rata-rata terdapat 16 insiden pada tiga bulan pertama tahun lalu sementara tahun ini rata-rata 11 insiden tiap bulan.



Gambar 4: Perbandingan jumlah serangan digital pada tiga bulan pertama 2022 dan 2023.
Sumber: SAFEnet, 2023

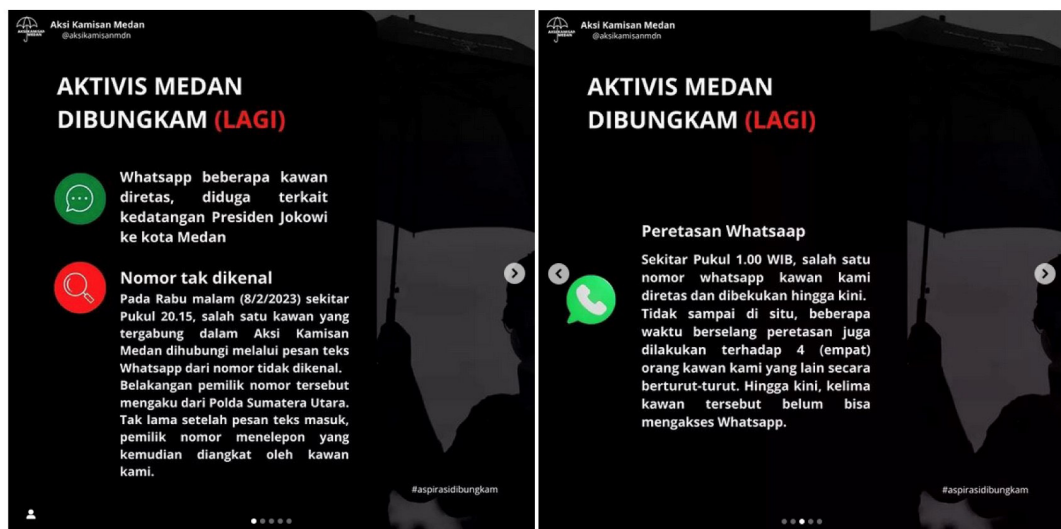
Meskipun demikian, motif politik tetap menjadi dugaan utama terjadinya serangan digital pada awal tahun ini. Pada Februari 2023, setidaknya lima aktivis di Medan, Sumatera Utara mengalami peretasan akun WhatsAppnya. Sebelum mengalami peretasan, aktivis tersebut didatangi aparat kepolisian yang meminta agar mereka

membatalkan rencana Aksi Kamisan karena akan ada kunjungan Presiden Joko Widodo.

Dugaan bahwa serangan bermotif politik tetap marak juga bisa kita lihat dari banyaknya korban dari latar belakang kelompok kritis. Lebih dari 55 persen korban serangan adalah aktivis atau staf organisasi masyarakat sipil (21 persen), jurnalis (17 persen), organisasi masyarakat sipil (10 persen), dan media (7 persen).

Latar belakang korban lainnya adalah lembaga publik serta mahasiswa dan pelajar masing-masing 10 persen. Ada juga korban dari latar belakang dokter, akademisi, dan warga biasa.

Insiden keamanan digital selama periode tersebut juga masih didominasi serangan digital berupa peretasan. Bentuk serangan ini terjadi sebanyak 17 kali atau sekitar 55 persen. Bentuk lain adalah akun tidak bisa diakses dan kebocoran data pribadi. Peretasan itu, antara lain terjadi pada 4 Januari 2023 terhadap [akun Youtube PKS TV](#) sehingga mereka tidak bisa masuk. Pada bulan yang sama juga terjadi penggantian tampilan pada situs web milik YLBHI. Situs YLBHI disusupi oleh orang tak dikenal dan mengganti tampilan mukanya.



Gambar 5: Peretasan WhatsApp terhadap aktivis di Medan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023. Sumber: IG Aksi Kamisan Medan.

Bentuk serangan yang mengemuka adalah serangan DDoS yang terjadi pada dua media, yaitu Narasi TV dan Project Multatuli. Situs Project Multatuli, menurut laporan dari pengelola, mengalami lonjakan kunjungan sampai membebani peladen (server) selama dua hari pada Maret 2023. Serangan itu terjadi setelah Project M merilis laporan tentang kasus pencabulan di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Sekitar seminggu sebelumnya, serangan serupa juga terjadi terhadap situs web Narasi TV. Serangan DDoS terhadap situs web Narasi TV terjadi hingga 172.800

kali sehingga situs web lambat diakses dan beban peladen membengkak. Insiden tersebut sudah dilaporkan kepada kepolisian, tetapi hingga akhir Maret lalu belum ada perkembangan lebih lanjut.

Situs web sendiri termasuk platform yang banyak mengalami serangan digital. Selain terjadi pada dua media tersebut, serangan terhadap situs web juga terjadi kepada Mahkamah Agung yang mengalami kebocoran data. Meskipun demikian, WhatsApp tetap menjadi media yang paling banyak diserang, yaitu 12 kali disusul Instagram (5 kali) dan Facebook (4 kali). Platform lain adalah Twitter (2 kali) di mana salah satunya terjadi pada Ariel Heryanto, akademisi Indonesia yang saat ini tinggal di Melbourne, Australia, meskipun kemudian akunnya berhasil dipulihkan kembali.

Masih maraknya insiden keamanan digital pada platform milik Meta Group, yaitu Facebook dan Instagram, bisa menjadi catatan khusus. Setidaknya ada dua insiden di mana akun milik komunitas mengalami masalah. Contohnya akun Instagram Girl Up UGM (@girlup.ugm) tidak bisa diakses karena ada aktivitas yang dianggap tidak mematuhi panduan komunitas. Hal sama terjadi pada halaman Facebook dan Instagram milik Suara Kita, media komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan lainnya (LGBTQIA+) yang tidak bisa mengunggah tautan berita dari situs web mereka. Tidak jelas apa penyebabnya, tetapi ada penjelasan bahwa unggahan tersebut melanggar standar komunitas.

Dua insiden di platform milik Meta tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk membahas lebih lanjut bagaimana moderasi konten oleh platform sebaiknya dilakukan. Sebab, jika tidak jelas mekanismenya, maka kejadian sama sangat bisa terjadi dan terulang di masa depan.

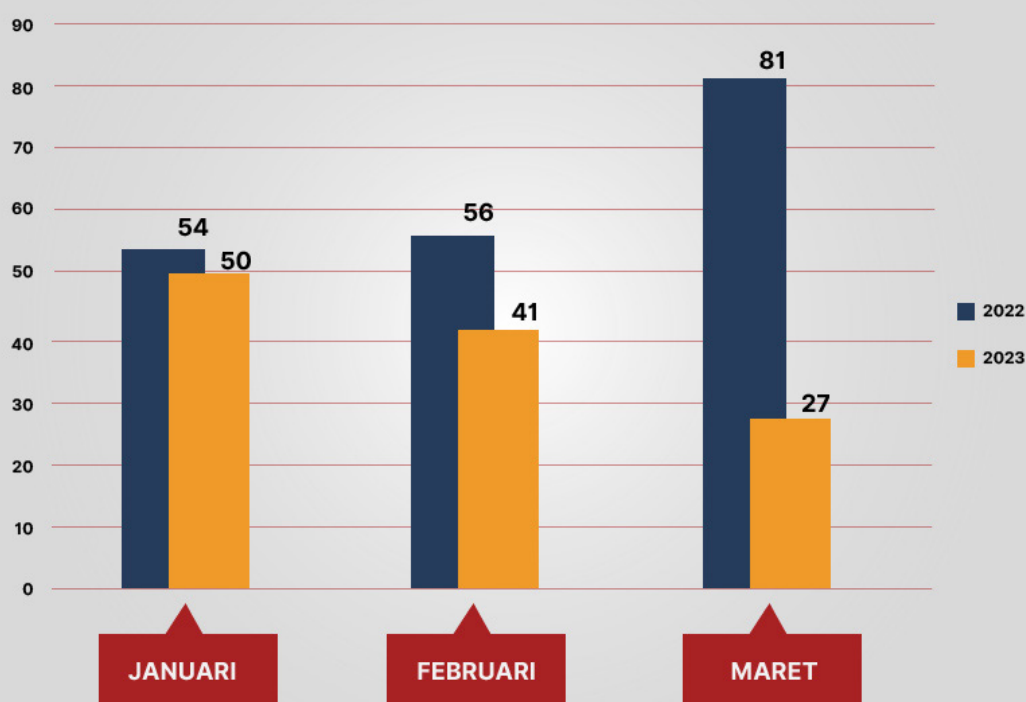
Bagian 4: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

KBGO pada tiga bulan pertama 2023 menunjukkan bahwa bentuk penyebaran konten intim non-konsensual dan sekstorsi masih mendominasi. Selama tiga bulan tersebut, jumlah aduan KBGO yang masuk ke SAFEnet cenderung turun. Terdapat total 118 aduan KBGO dengan rincian 50 aduan pada Januari, 41 pada Februari, dan 27 aduan pada Maret 2023.



Dibandingkan tiga bulan pertama tahun 2022 lalu, jumlah aduan tahun ini juga lebih rendah. Pada periode sama tahun lalu, terdapat 191 insiden KBGO dengan 54 kasus pada Januari, 56 pada Februari, dan 81 kasus pada Maret 2022.

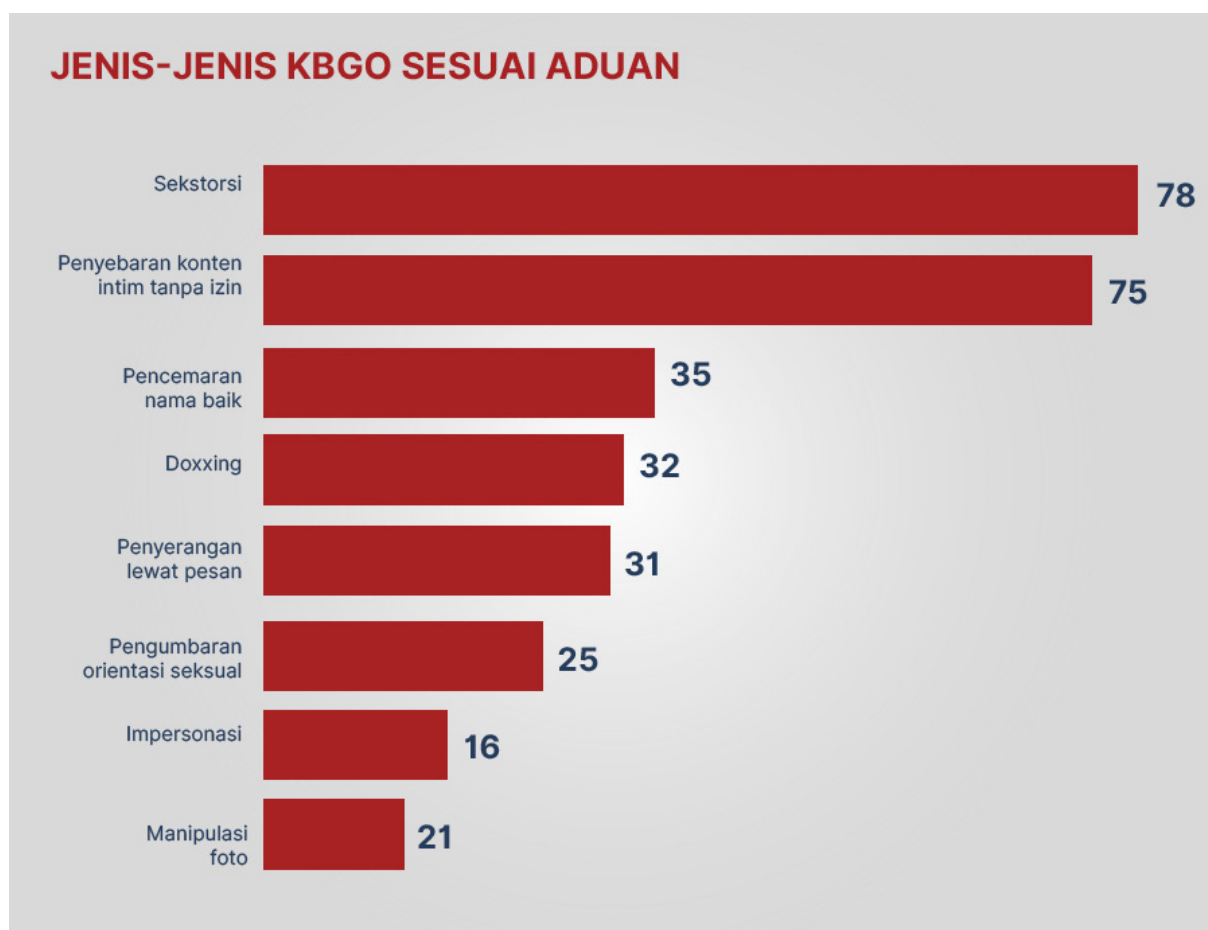
PERBANDINGAN JUMLAH ADUAN KBGO



Gambar 6: Perbandingan jumlah aduan KBGO tiga bulan pertama 2022 dan 2023. Sumber: SAFEnet, 2023.

Dari 118 aduan selama dua bulan tersebut, jenis KBGO yang paling banyak dilaporkan adalah sekstorsi (78 aduan) dan penyebaran konten intim tanpa izin (76 aduan). Sekstorsi adalah jenis KBGO berupa permintaan uang atau layanan seksual dengan menggunakan konten intim korban. Berdasarkan aduan yang masuk ke SAFEnet, cara pelaku melakukan sekstorsi ini berbeda-beda. Ada korban yang mengaku dijemak pelaku melalui panggilan video seks (VCS) dan direkam diam-diam oleh pelaku. Pelaku lalu mengancam akan menyebarkan video rekaman itu jika korban tidak membayar sejumlah uang. Namun, ada pula pelaku yang meminta layanan seks kepada korban, bukan uang.

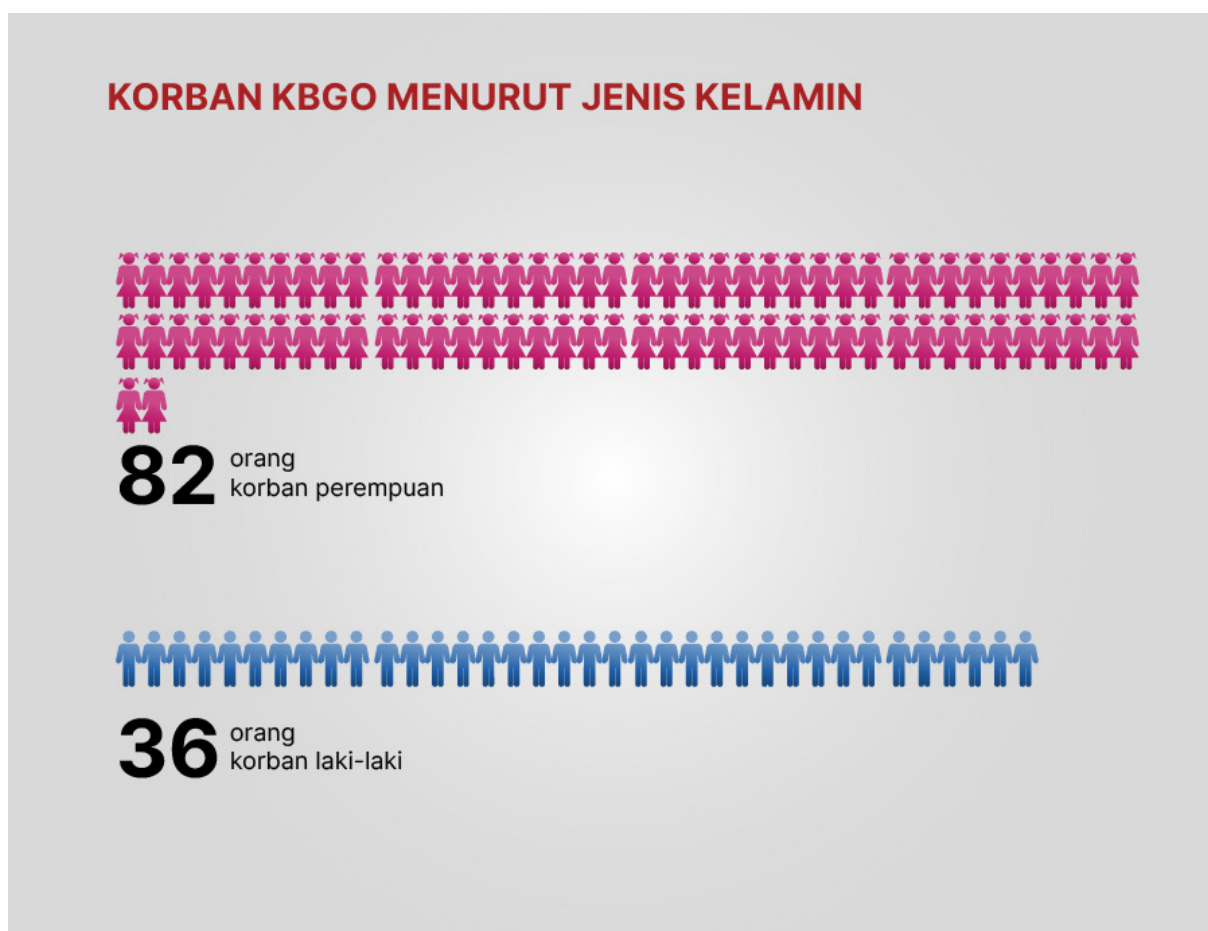
Selain dua jenis di atas, bentuk lain KBGO yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik (35 aduan), penyebaran data pribadi tanpa izin atau *doxxing* (32 aduan), penyerangan secara personal melalui pesan pribadi atau *flaming* (31 aduan), dan pengumbaran identitas gender atau orientasi seksual (25 aduan). Dua bentuk lainnya adalah peniruan akun (16 aduan) dan rekayasa foto korban menjadi materi pornografi (12 aduan). Sebagian besar insiden KBGO melibatkan beberapa bentuk KBGO sekaligus.



Gambar 7: Jenis KBGO paling banyak selama triwulan pertama 2023. Sumber: SAFEnet, 2023.

Pelaporan yang diterima tersebar dari 14 provinsi, dengan kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat (29), disusul Jawa Timur (19), Jakarta (12), Jawa Tengah (16), dan Yogyakarta (8). Hal ini menunjukkan bahwa KBGO masih dominan dilaporkan dari Pulau Jawa, daripada luar Pulau Jawa yang hanya tercatat 13 aduan dari total 9 provinsi. Pada periode ini ada 15 aduan yang tidak mencantumkan lokasi.

Dari 118 aduan yang diterima, ada 104 yang diadukan langsung oleh korban. Selain korban, pelaporan juga dibuat keluarga atau pasangan (5), teman (4), dan pendamping kasus (4). Tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perempuan tetap paling banyak menjadi korban KBGO dengan 82 orang (70 persen), sedangkan laki-laki 36 orang (30 persen).



Gambar 8: Korban KBGO selama triwulan pertama 2023 dari sisi gender. Sumber: SAFEnet, 2023.

Situasi yang dihadapi korban perempuan biasanya bermula karena pernah menyerahkan konten intim pada pasangan, direkam diam-diam oleh pelaku, data yang dicuri oleh pelaku (orang dekat, atau dikenal maupun orang asing). Bahkan ada korban yang mengaku diancam pihak yang awalnya menawarkan jasa untuk mengembalikan akunnya yang diretas. Tawaran ini justru berujung pada pihak penyedia jasa mengambil alih akun korban dan memerasnya untuk menyediakan konten telanjang jika ingin akunnya kembali.

Masih adanya korban dari kalangan usia anak (12-17 tahun) juga menjadi catatan lain dari kasus KBGO selama triwulan pertama 2023. Sepanjang tiga bulan tersebut, terdapat 13 aduan (11 persen) dari anak di bawah umur. Jumlah tersebut memang lebih sedikit dibanding usia 18-25 dengan 91 aduan (77 persen) dan 26-35 dengan 14 aduan (12 persen). Meskipun demikian, angka ini tetap membunyikan alarm tentang pentingnya perlindungan anak serta literasi tentang kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender *online* di kalangan anak-anak tersebut.

